

**PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI
BUPATI KEPADA CAMAT BIDANG PEKERJAAN UMUM
DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK
TAHUN 2011-2012**

Rian Hidayat

Dan

Drs. Ali Yusri, MS

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: rian9150@gmail.com

Abstract

In applying the policy in the era of regional autonomy in accordance with the Local Government legislation, it is necessary to do Delegation of Authority of Heads of Regional Most officials below it in order to assist the implementation of the tasks entrusted with running the Administration greater. According to the Decree of the Minister of Home Affairs No. 138-270 of 2010 on Guidelines guidelines the District Integrated Services Administration (PATENT), portion melimpahkan Siak district to sub-district authority Regents to implement local government affairs through Siak regent Regulation No. 42 Year 2011. The purpose of this study was to determine the Implementation and inhibiting factors Delegation of Authority of Regents To the sub-district in the district of the Field of Public Works Mempura Siak 2011-2012. Where in assessing the implementation of the devolution of authority can be reviewed through the analysis and standardization activities, description and standardization activities, the measurement of the extent of the changes observed and determine the changes observed.

This research was conducted in the district in which the Siak Mempura selected respondents came from the District Administrative Mempura Village Chief Data collection and research conducted by interview and questionnaires to the respondents. Once the data is collected and then elaborated by descriptive methods.

From the results of the study found that the majority Delegation of Authority Implementation of Regents To the sub-district in District Mempura Siak is rated Not Succeed Neither the percentage of 62%, while the indicator Successfully Neither the percentage 25%. Where these indicators have sub standard indicators, assessment and evaluation. From interviews also found that the barriers to the implementation of this delegation of authority is still a lack of personnel sub-district government officials and the lack pasrtisipasi mempura community in supporting the implementation of the devolution of authority

Keywords: Planning, Employee competence, participation

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah melaksanakan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia secara kontinuitas untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan adanya aparatur pemerintah dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah yang memiliki kapasitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Agar pembangunan nasional dapat tercapai, aparatur pemerintah harus dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai abdi Negara. Salah satunya adalah kemampuan aparatur pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengabdian kepada masyarakat adalah pelayanan kepada masyarakat umum. Dengan demikian selaku abdi masyarakat dan abdi Negara, aparatur pemerintah harus tetap memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. karena salah satu tugas Negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. pemerintah bukan hanya memberikan pelindung pertahanan keamanan, politik, diplomasi, akan tetapi juga menjamin kepentingan umum dalam bidang social ekonomi dan segala urusan masyarakat.

Namun secara empiris, kondisi administrasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah masih memperhatikan. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang merupakan output dari kegiatan administrasi pemerintah makin lama justru semakin banyak. Seiring dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan optimal.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan pentingnya Pelayanan Publik yang bcepat dan efisien. Perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu, Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No 138-270 tahun 2010 tentang Petunjuk Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemerintah kabupaten siak melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah melalui Peraturan Bupati Siak No 42 Tahun 2011.

Kecamatan Mempura sebagai salah satu kecamatan di kabupaten siak yang memiliki letak geografis yang strategis dan potensi alam yang baik, menjadikan kecamatan ini potensial sebagai tempat berinvestasi. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi tempatan yang akhirnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat Mempura khususnya dan Kabupaten Siak secara keseluruhan.

Dilihat dari Peraturan Bupati Siak No 42 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat meliputi 8 (delapan) aspek utama yaitu :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;

6. Fasilitasi;
7. Penetapan; dan
8. Penyelenggaraan.

Kedelapan aspek utama tersebut mempunyai rincian kewenangan yaitu aspek perizinan 72 kewenangan, aspek rekomendasi 21 kewenangan, aspek koordinasi 10 kewenangan, aspek pembinaan 16 kewenangan, aspek pengawasan 29 kewenangan, aspek fasilitasi 36 kewenangan, aspek penetapan 5 kewenangan dan aspek penyelenggaraan 23 kewenangan. Kehadiran Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah tersebut mempertegas kembali kewenangan Camat. Dapat dikemukakan bahwa prinsip dalam memberikan pelimpahan wewenang harus memberikan perhatian pada isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Isi kebijakan menyangkut pengaruh kepentingan yang ada, keuntungan-keuntungan yang diperoleh, kejelasan tujuan, program pelaksanaan dan dukungan sumber daya baik finansial maupun personil, sedangkan dalam konteks pelaksanaan kebijakan menyangkut bentuk dan indikator wewenang, kepentingan dan strategi, karakter rezim pimpinan dan organisasi serta tanggung jawab. Guna mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang diperlukan adanya keserasian antara prinsip-prinsip yang mendasari dengan praktek penyelenggaraan otonomi yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia, keuangan, peralatan serta organisasi dan manajemen.

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa masalah yang terjadi di tengah masyarakat dalam Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat bidang Pekerjaan Umum yaitu :

1. Pengawasan Pemanfaatan Bangunan
2. Pelaksanaan Penomoran Bangunan
3. Pendataan Bangunan dan
4. Pemberian Izin Bangunan

Dilihat dari Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat khususnya dalam bidang pekerjaan umum belum dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari berbagai fenomena dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti :

1. Masih adanya bangunan perumahan masyarakat yang belum memiliki izin mendirikan Bangunan (IMB) sehingga pendataan rumah warga belum dapat terdata dengan baik.
2. Penomoran bangunan rumah tidak dilaksanakan, sehingga penomoran rumah tidak beraturan. Hal ini dapat dilihat penomoran rumah di desa Merempan hilir bahwa penomoran rumah tidak berurutan dan yang memberikan nomor tersebut ditetapkan oleh masing-masing warga untuk menetapkan berapa nomor rumahnya.
3. Penerangan lampu jalan di Kecamatan Mempura tidak beraturan dan belum merata sehingga masyarakat membuat aliran lampu penerangan jalan desa/ kelurahan sendiri.

Berdasarkan masalah diatas untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat Bidang Pekerjaan Umum di Kecamatan Mempura Tahun 2011-2012.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dikemukakan tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Mempura ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan tersebut?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati ke Camat Bidang Pekerjaan Umum di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun 2011-2012.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan di Kecamatan Mempura.

Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan tugas kecamatan dan fungsi-fungsi pemerintahan khususnya di kecamatan mempura.
2. Untuk menambah bahan ataupun informasi data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan atau ruang lingkup yang sama.
3. Untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Riau Khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Metode Penelitian

Dalam penerapan sampel untuk penelitian ini, penulis menggolongkan dua kelompok sampel yaitu : sampel dari aparat pemerintah dan sampel dari masyarakat (KK). Untuk sampel aparat pemerintah atau kecamatan penulis menggunakan teknik sensus dengan alasan selain polulasi jumlah yang sedikit tapi juga mudah untuk ditemukan. Untuk kepala desa dan masyarakat digunakan "*purposive area*" dengan menetapkan 3 desa yang terjauh, desa menengah dan desa terdekat. Sedangkan untuk masyarakat (KK) disetiap desa sampel juga menggunakan "*purposive sampling*".

Selanjutnya adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terdiri : Camat, Sekcam, Kasi PMD, Kepala Desa, dan Staf Pegawai Kantor Camat Mempura ditambah dengan Perangkat Desa.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisa secara kualitatif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut di kelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat bidang Pekerjaan Umum Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun 2011-2012

Dalam keputusan Menti Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 bahwa segala tugas yang dikerjakan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan daerah kabupaten atau kota sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota”. Tentang kewenangan dan fungsi yang dilakukan oleh camat dalam menyelenggarakan pemerintahan secara umum, namun semuanya itu tetap dikoordinir oleh tingkat yang lebih tinggi yaitu pemerintahan kabupaten dalam yang dalam artian semua penyelenggaraan yang dilimpahkan kepada pemerintahan kecamatan tetap yang menjadi pengawas adalah dari tingkat atas yaitu pemerintahan kabupaten. Dalam penelitian ini penulis menganalisa tentang pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat pada bidang pekerjaan umum tahun 2011-2012 yang tertuang dalam peraturan bupati siak nomor 42 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat.

- a) Pengawasan pemanfaatan bangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas camat dalam Pengawasan Pemilik Bangunan, Pengawasan Jenis Bangunan dan Pengawasan Penggunaan Bangunan.
- b) Pelaksanaan penomoran bangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas camat dalam Pendataan Bangunan dan pemberian nomor. Nomor dibuat sebelah kanan dengan nomornya genap dan disebelah kiri dengan nomor ganjil, dan data nomor rumah diserahkan dengan kepala desa/lurah.
- c) Pendataan bangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas camat dalam mendata bangunan tempat tinggal yang permanen dan semi permanen, mendata bangunan kantor pemerintahan/ swasta/ toko/ kedai dan mendata rumah ibadah.
- d) Pemberian izin bangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas camat dalam menghimbau masyarakat agar mengurus izin mendirikan bangunan, pembinaan bagi yang tidak mengurus dan pemberian sanksi bagi yang melanggar.

Selanjutnya untuk melihat Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati ke Camat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak yang dilihat dari Pengawasan Pemanfaatan Bangunan, Pelaksanaan Penomoran Bangunan, Pendataan Bangunan dan Pemberian Izin Bangunan dapat dilihat sebagai berikut :

B. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi kasus bidang Pekerjaan Umum 2011-2012)

No	Item Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Berhasil Baik	Cukup Baik	Tidak Berhasil Baik	
1.	Pengawasan Pemanfaatan Bangunan	4 (25%)	2 (13%)	10 (62%)	16 (100%)
2.	Pelaksanaan Penomoran Bangunan	4 (25%)	2 (13%)	10 (62%)	16 (100%)
3.	Pendataan Bangunan	3 (19%)	2 (13%)	11 (69%)	16 (100%)
4.	Pemberian Izin Bangunan	4 (25%)	2 (13%)	10 (62%)	16 (100%)
Jumlah		15	8	41	64
Rata-rata		4	10	2	16
Persentase %		25	13	62	100

Sumber : Data Olahan, November 2013

Dari hasil rekapitulasi terhadap variabel pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati ke camat di bidang pekerjaan umum terlihat jelas bahwa pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut sudah berjalan Baik. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pelimpahan Kewenangan Bupati ke Camat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dikategorikan Berhasil Baik berjumlah 15 dengan rata-rata 4 dan persentase 25%.
2. Pelimpahan Kewenangan Bupati ke Camat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dikategorikan cukup baik berjumlah 8 dengan rata-rata 10 dan persentase 13%.
3. Pelimpahan Kewenangan Bupati ke Camat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dikategorikan tidak berhasil baik berjumlah 41 dengan rata-rata 2 dan persentase 62%.

Sehingga dapat dilihat bahwa pelimpahan kewenangan dari bupati ke camat di kecamatan mempura kabupaten siak dikategorikan Tidak Berhasil Baik dengan jawaban responden yang disebarkan melalui angket berjumlah 41 dengan rata-rata 62%.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Bupati ke Camat bidang Pekerjaan Umum di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun 2011-2012

Adapun hambatan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati ke Camat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Staf Pegawai Kecamatan Mempura sehingga untuk melakukan tugas seperti pengawasan kepemilikan izin mendirikan bangunan (IMB) tidak dapat dilaksanakan.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di kantor kecamatan Mempura.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah Kelurahan/ pemerintahan Desa untuk turut serta dalam peduli terhadap Penomoran Rumah di Kecamatan Mempura.

DAFTAR BACAAN

A. Buku-buku

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung..
- Budiarjo Meriam, 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Geamedia, Jakarta
- Carduso Gomes, Faustini. 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Hasibuan Melayu, 2001. *Manajemen (dasar, pengertian dan masalah)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Kaho, yosep riwis, 1997. *Prospek otonomidaerah di negara rebuplik indonesia*, jakarta; Rajawali Pess.
- Koryati. Nyimas Dwi, dkk. 2005, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, YKPI, Yogyakarta
- Mahfud Moh. MD ” *Dasar dan Struktur Ketatanegaraaan Indonesia*” Jakarta, PT Rineka Cipta 2001.
- Maklin.A.R. 2000.*Peluang dan Tantangan Otonomi Keuangan & Investasi Daerah di Era Otonomi Daerah*. 2000. Government Conference Peluang Investasi & Otonomi Daerah. Jakarta.
- Manan.Bagir, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII-Press, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada, Yogyakarta
- Nugroho.Riant.2004, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*.
- Silalahi, 1992. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep dan Teori dan Dimensi*. Sinar Baru, Bandung
- Singarimbun.Masri dan Syofyan Efendi. 1995. *Methodode Penelitian Survei*, LP3S. Yogyakarta.
- Winardi, 2003. *Manajemen Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta
- Winarto.Budi. 2007. *Kebijakan Publik (teori & proses)*. PT. Buku Kita. Jakarta
- Wursanto, 2003. *Dasar-dasae ilmu organisasi*, Andi, Yogyakarta

B. Peraturan Perundangan

- Peraturan Bupati Siak Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pemekaran Kecamatan Siak.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.